

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia merdeka secara *de facto* dan *de jure*, maka Indonesia menjadi negara yang independen, negara yang seharusnya berdiri sendiri tanpa pengaruh dan pengawasan dari pihak lain terutama dalam hal ini ialah penjajah. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus dapat mengatur kehidupannya sendiri tanpa ada pengaturan dari negara lain, karena tentu saja sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyatnya.

Termasuk dalam kehidupan ekonomi Indonesia pasca merdeka dari pihak kolonial Belanda. Indonesia harus dapat menentukan kebijakan dan mengatur masalah ekonominya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sebuah bank sentral sebagai pengatur kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dan juga sebagai kasir bagi pemerintah. Pada tahun 1946, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah bank yang ditujukan untuk menjadi bank sirkulasi dan bank sentral di Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI 46) yang merupakan hasil peleburan dari *Jajasan Poesat Bank Indonesia* untuk menggantikan peran *De Javasche Bank* pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu masih dimiliki oleh pemerintah Belanda (Rahardjo, 2005:2).

Namun hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 memutuskan bahwa *De Javasche Bank* yang ditunjuk sebagai bank sentral bagi Indonesia sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI 46) ditugasi sebagai bank pembangunan (Rachbini, 2000:1). *De Javasche Bank* merupakan sebuah bank milik pemerintah kolonial Belanda berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi tugas sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda pada saat pendudukan Belanda di Indonesia. Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tersebut maka timbullah upaya dari pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia.

Dinasionalisasikannya *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia merupakan salah satu upaya mengikis pengaruh kolonial setelah Indonesia merdeka. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh A. Karim dalam Rachbini (2000:2) menyatakan bahwa *De Javasche Bank* adalah alat kolonial yang tidak cocok lagi dengan alam Indonesia merdeka. Meskipun *De Javasche Bank* disepakati dan diputuskan bersama oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda sebagai bank sentral, akan tetapi pengaruh kepentingan kolonial dalam menentukan kebijakan masih kental. Posisi *De Javasche Bank* menjadi dilematis karena suatu Negara mempunyai bank sentral yang masih berada di bawah pengaruh kepentingan lain (Rachbini, 2000: 1).

Sebelum menentukan kebijakan ekonomi yang harus diambil dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan, maka pemerintah harus terlebih dahulu menentukan kebijakan penasionalisasian perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih dikuasai pihak

asing karena perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki andil besar dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan nasionalisasi ini diambil karena sebagian besar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

Hal di atas sesuai dengan paparan dari Hans Meier yang dikutip oleh Thee Kian Wie mengenai ikut campur atau intervensi asing dalam ekonomi Indonesia (http://www.kompascom/kompascetak/0106/01/soekarno/tant53_h.htm) yang menyatakan bahwa selain masalah Irian Barat masalah kemerdekaan Indonesia belum dirasakan secara tuntas oleh para pejuang kemerdekaan karena berbagai sektor ekonomi yang penting masih dikuasai Belanda. Dalam persetujuan finansial ekonomi (*Finacieel-Economische Oveeren Komst Finec*) yang telah dicapai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tuntutan Belanda untuk memperoleh jaminan bahwa bisnis Belanda dapat tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan, terpaksa dipenuhi oleh Indonesia. Hal ini tentu saja merugikan bangsa Indonesia sebagai bangsa baru yang harus giat membangun perekonomiannya. Oleh karena itu salah satu program pemerintah adalah upaya untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia terutama *De Javasche Bank* yang memiliki peran penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Proses nasionalisasi secara *de facto* sebenarnya telah berlangsung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 123 tanggal 12 Juli 1951 yaitu dengan diangkatnya putera Indonesia, Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank* menggantikan Dr. A. Houwink selaku Presiden *De Javasche Bank*

sebelumnya yang diberhentikan secara hormat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 tanggal 12 Juli 1951. Setelah itu dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tanggal 19 Mei 1953 yang telah disahkan oleh parlemen dan diumumkan dalam Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953 dibentuklah Bank Indonesia untuk menggantikan peranan formal yang pernah dipegang oleh *De Javasche Bank* dan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan akhirnya menjadi bank sentral seutuhnya (Rahardjo, 2005: 3).

Setelah *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953 maka peranannya itu berkaitan erat dengan kebijakan dan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa setelahnya bahkan sampai sekarang. Namun dalam peranannya tersebut, Bank Indonesia mengalami hambatan-hambatan berupa masalah ekonomi yang dihadapi sebelum dan ketika Bank Indonesia berdiri, Masalah ekonomi yang muncul pada kurun waktu 1950-1953 antara lain ialah masalah produktifitas ekonomi yang sangat rendah kerana kerusakan parah pada sektor produksi. Kelangkaan devisa, terbatasnya persediaan barang konsumsi penting dan inflasi yang tinggi. Masalah-masalah tersebut menuntut pemerintah untuk segera menentukan kebijakan ekonomi. Tindakan pemerintah itu diantaranya adalah dengan dijalankannya sertifikat devisa, devaluasi mata uang atau pun nasionalisasi *De Javasche Bank* yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda (Beng To, 1991: 160-161).

Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sampai pada tahun 1950-an sangat tidak stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank*.

Pemerintah berharap dengan adanya nasionalisasi ini, perekonomian Indonesia dapat berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, dengan berjalannya Bank Indonesia sebagai bank sentral menggantikan *De Javasche Bank* banyak hambatan yang dihadapi oleh Bank Indonesia tersebut yang ternyata juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi Indonesia pada saat itu.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam perjalanannya tersebut terbagi ke dalam dua faktor yaitu faktor eksternal (dari luar) dan faktor internal (dari dalam). Faktor internal yang dihadapi Bank Indonesia dapat dilihat dari kelembagaan dan struktur organisasi yang belum teratur dan terarah ketika awal berdirinya Bank Indonesia; Masih adanya intervensi asing terutama dari pihak kolonial Belanda terhadap kebijakan Bank Indonesia; Terdapat ketidak seragaman antara pemerintah dengan petinggi Bank Indonesia dalam hal mengeluarkan kebijakan ekonomi negara yang menyebabkan Gubernur pertama Bank Indonesia mengundurkan diri pada tahun 1958 (Rahardjo, 1995: 90).

Sedangkan faktor eksternal dapat terlihat dari keadaan di sekitar Bank Indonesia yang tentunya menjadi penghambat Bank Indonesia dalam melaksanakan peranannya. Seperti, keadaan ekonomi negara yang belum stabil dikarenakan baru merdeka. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai inflasi dan defisit anggaran belanja negara, sistem politik yang tidak stabil seperti banyaknya pemberontakan di daerah-daerah, silih bergantinya kabinet pada masa Demokrasi Liberal yang berpengaruh pada perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan setiap kabinet dan kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan

keadaan politik dibandingkan keadaan ekonomi negara pada masa Demokrasi Terpimpin, dan permusuhan dengan pihak barat (Tambunan, 2009: v).

Banyak faktor yang menyebabkan perekonomian Indonesia terlihat tidak berkembang pada periode 1953-1966 bahkan setelah didirikannya Bank Indonesia. Bank Indonesia yang pada awal pendiriannya diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya sebagai pengendali moneter ternyata tidak dapat mengatasi perekonomian Indonesia setuhnya karena kerumitan dan kompleksnya masalah perekonomian Indonesia tahun 1953-1966. Bank Indonesia sendiri pada kenyataannya memang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Kedudukan dan peranan Bank Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan manajemen internalnya, melainkan dipengaruhi juga oleh situasi ekonomi nasional bahkan perkembangan politik yang penuh dengan pergolakan pada masa-masa antara tahun 1953-1966.

Hal di atas memperlihatkan peranan Bank Indonesia tersebut tidak sempat berjalan secara maksimal karena keadaan negara sendiri yang tidak stabil yang disebabkan oleh berbagai faktor terutama kekacauan politik yang terjadi pada kurun waktu antara tahun 1953-1966. Sehingga peranan tersebut tidak selamanya dapat memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini lah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai peranan-peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1953 sampai dengan 1966.

Sejak didirikannya Bank Indonesia tahun 1953 sampai tahun 1966, Bank Indonesia paling tidak telah melakukan pergantian Gubernur Bank sebanyak

delapan kali. Dinamika pergantian Gubernur Bank Indonesia ini telah berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai perekonomian Indonesia khususnya dalam mengatasi krisis ekonomi. Hal yang paling disoroti dalam hal ini yaitu pada saat Bank Indonesia dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Gubernur pertama Bank Indonesia yang memimpin selama lima tahun.

Ketertarikan lain dalam hal ini yaitu ketika Teuku Yusuf Muda Dalam diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1963-1964, 1964-1965 dan 1965-1966. Pada tahun 1963-1964 terjadi perubahan yang penting, yaitu ketika Gubernur Bank Indonesia yakni Teuku Yusuf Muda Dalam ditetapkan pula sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Sehingga dalam hal ini terjadi dualisme jabatan pada Gubernur Bank Indonesia. Dengan perubahan tersebut, apakah akan terjadi kemungkinan perubahan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia terhadap perekonomian Indonesia atau sama sekali tidak berpengaruh. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkajinya dalam penelitian ini.

Setelah *De Javasche Bank* berubah menjadi Bank Indonesia banyak tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia sudah sewajarnya memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Fungsi dan peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dapat dijalankan setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 tanggal 19 Mei 1953 yang mengatur tugas pokok Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953, khususnya pada pasal 7, Bank Indonesia sebagai bank sentral ditugasi terutama untuk menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan. Sekalipun demikian Bank Indonesia ternyata masih melanjutkan dan mewarisi sebagian kecil fungsi dan peranan *De Javasche Bank* sebagai bank umum dan bank devisa, yang memang tidak bijaksana jika dilepas begitu saja. Pasal 7 yang mengandung konsep bank sentral dalam arti modern tersebut memberikan ciri khusus Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam konteks negara yang sedang membangun (Rahardjo, 2005:4).

Seluruh tugas dan peran Bank Indonesia sendiri sebenarnya dipaparkan dalam Undang-Undang pokok Bank Indonesia, termasuk pada pasal 7 tersebut. Lalu timbullah pertanyaan disini yaitu apakah dalam kenyataannya Bank Indonesia memang telah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan yang telah dituliskan dalam Undang-undang. Karena jika melihat kondisi perekonomian pada tahun-tahun 1950-an sampai tahun 1960-an keadaan perekonomian Indonesia dapat dikatakan berada dalam keadaan yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena ketidakstabilan politik. Karena antara kehidupan politik dan kehidupan ekonomi dalam suatu bangsa itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia terutama pada kisaran tahun 1953-1966 dapat dikatakan sebagai sebuah dinamika yang terus terjadi secara bertahap. Dimulai sejak Partai Komunis Indonesia (PKI) menanamkan

kembali pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia pada tahun 1955 dimana pada saat itu PKI meraih suara tinggi dalam Pemilihan Umum 1955 yang tentu saja banyak ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pertentangan itu terlihat sejak tahun 1955 sampai meletusnya Gerakan 30 September 1965. Pergolakan politik tersebut tentu saja berpengaruh pula pada kehidupan ekonomi Indonesia. Sehingga menimbulkan sebuah spekulasi, sampai sejauh mana peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian Indonesia.

Selain itu, permasalahan ekonomi Indonesia menjadi menarik pada saat Mohammad Hatta selaku wakil presiden mundur dari jabatannya pada tahun 1956. Mohammad Hatta merupakan ahli ekonomi yang bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, yang bisa dikatakan sebagai pelengkap dari Presiden Soekarno dalam memimpin negara Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Soekarno dikenal sebagai penggagas politik yang bijaksana maka dari itu Presiden Soekarno memerlukan pasangan politik yang dapat pula mengatasi kehidupan ekonomi bangsa yang dipimpinnya. Mohammad Hatta dianggap sebagai pasangan yang tepat untuk Presiden Soekarno agar kehidupan politik dan ekonomi Indonesia dapat seimbang.

Lalu bagaimanakah perjalanan perekonomian Indonesia setelah Mohammad Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mungkin hal ini pula yang menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia karena setelah itu Presiden Soekarno terlihat lebih mementingkan kehidupan politik Indonesia saja. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya keterampilan Presiden Soekarno dalam permasalahan ekonomi. Selain itu bagaimana pula

peranan Bank Indonesia setelah Mohammad Hatta turun dari jabatannya. Apakah hal ini turut mempengaruhi pada kinerja Bank Indonesia ataukah tidak berpengaruh sama sekali.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam peranan Bank Indonesia terhadap kehidupan perekonomian Indonesia antara tahun 1953-1966 ketika Bank Indonesia didirikan setelah dinasionalisasikan dari *De Javasche* bank hingga berakhirnya masa pemerintahan Soekarno. Adapun alasan pemilihan tahun pada penelitian ini lebih ditujukan pada keinginan penulis untuk melakukan perbandingan antara kedua periode yang ada diantara tahun 1953-1966 yaitu masa Demokrasi Liberal oleh para kabinet dan masa Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno. Kedua periode tersebut memiliki karakteristik berdeda, oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan pun akan berbeda pada setiap pemerintahan dalam mengatasi krisis ekonomi. Tahun 1953 penulis jadikan patokan karena pada tahun tersebut Bank Indonesia telah sah menjadi Bank Sentral sebagai hasil dari nasionalisasi *De Javasche Bank*. Sedangkan akhir dari penelitian, penulis mengambil angka tahun 1966 karena pada masa itu berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin yang menandai juga berakhirnya masa pemerintahan Soekarno. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul “ Peranan Bank Indonesia dalam Kehidupan Ekonomi Indonesia Tahun 1953-1966 .”

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat satu permasalahan pokok yang menjadi kajian penulisan skripsi ini yaitu: “Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam upaya mengembangkan perekonomian Indonesia khususnya pada tahun 1953-1966?”

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan Bank Indonesia pada tahun 1953-1966?
3. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ekonomi Indonesia pada tahun 1953-1966?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Begitupun dalam penulisan ini penulis memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya Bank Indonesia dengan melihat kondisi sosial-politik Indonesia pada tahun 1945-1953 serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun 1945-1953.
2. Menguraikan perkembangan Bank Indonesia pada tahun 1953-1966 yang meliputi aspek fungsi dan tugas Bank Indonesia, struktur organisasi Bank Indonesia serta modal awal Bank Indonesia.

3. Menganalisis kedudukan Bank Indonesia sistem ekonomi Indonesia yang meliputi aspek kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan serta usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia tahun 1953-1966 yaitu kebijakan moneter dan kebijakan ekspor-impor Bank Indonesia serta menganalisis dampaknya pada perekonomian Indonesia tahun 1953-1966.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Bagi penulis sendiri, penulis berharap agar penulisan ini dapat menambah wawasan penulis mengenai sejarah ekonomi Indonesia dan dapat menjadi karya terbaik penulis dalam menempuh jenjang sarjana muda di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dari sisi kesejarahan, penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia pada tahun 1953-1966 bagi masyarakat luas pada umumnya dan para akademisi khususnya. Secara umum penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini dapat memperkaya khazanah kepustakaan mengenai sejarah ekonomi Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembelajaran sejarah di sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas karena sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) kelas XII program IPS semester II yaitu dengan SK menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru dan KD menganalisis

perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan dan SKKD kelas XI program IPA semester II serta kelas XII program Bahasa semester I dengan SK merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru dan KD merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak Proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini ialah nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, saling menghormati dan menghargai. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai pembentuk suatu karakter seseorang. Nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan di persekolahan melalui suatu pelajaran yang diikuti oleh setiap siswa. Dengan mempelajari dan memahami tema dari penelitian ini di setiap sekolah maka penulis berharap bahwa nilai-nilai berkarakter yang terkandung dari materi penelitian ini dapat dikembangkan oleh siswa.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini dituntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu metode historis juga mengandung pengertian sebagai suatu

proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39).

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 48-50).

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Di dalam heuristik, penulis mencoba mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sumber-sumber tersebut hanya berasal dari sumber buku dan hasil browsing internet. Sumber primer yang penulis gunakan ialah sumber yang berasal dari laporan-laporan keuangan Bank Indonesia dan arsip lainnya seperti Undang-Undang Bank Indonesia dan Surat Keputusan pemerintah. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan ialah berupa sumber-sumber literature yakni buku-buku yang berkaitan mengenai masalah yang penulis angkat yaitu mengenai peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia tahun 1953-1966.

2. Kritik (Menilai Sumber Sejarah)

Setelah tahap mencari dan mengumpulkan sumber, berikutnya penulis melakukan kritik atas sumber, yaitu memilah dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah ditemukan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam sumber-sumber yang didapat untuk mendapatkan kebenaran sumber.

3. Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)

Tahap yang ketiga adalah interpretasi, dalam tahap ini penulis melakukan proses penafsiran dan menyusun makna kata-kata yang diperoleh setelah proses

kritik sumber dengan cara menghubungkan satu fakta dengan yang lainnya sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang Peranan Bank Indonesia terhadap kehidupan ekonomi Indonesia tahun 1953-1966. Di dalam Interpretasi juga terdapat eksplanasi yaitu penjelasan.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi, yakni menyajikan hasil temuan pada tiga tahapan sebelumnya dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan dengan gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

1.5.2 Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memakai studi dokumentasi dan studi literatur. Studi literatur merupakan teknik yang digunakan oleh penulis dengan membaca berbagai sumber buku dan mencari sumber lewat *browsing* internet yang berkaitan dengan tema penelitian, serta mengkaji sumber lain berupa dokumen seperti arsip yang mendukung penulisan skripsi ini. Setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis, ditafsirkan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (Ismaun, 2005: 125-131). Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan skripsi, penulis melakukan teknik penelitian dengan menggunakan studi literatur, teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan karya ilmiah yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi ringkasan secara rinci mengenai latar belakang penulisan yang menjadi alasan penulis sehingga merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia yang ditujukan sebagai bahan penulisan skripsi, rumusan dan pembatasan masalah yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yaitu materi yang berkaitan dengan peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia tahun 1953-1966. Penjelasan materi-materi tersebut adalah berupa informasi-informasi yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka ini dipaparkan beberapa konsep. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam bab ini adalah konsep-konsep yang relevan dengan bahan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian, di dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penulis menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian yang berisi langkah-langkah penelitian, dimulai dari persiapan sampai langkah terakhir dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada tahap ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi mengenai peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia.

BAB IV Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Indonesia Tahun 1953-1966, dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai seluruh informasi dan data-data yang diperoleh penulis tentang peranan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia melalui penelitian yang telah dilakukan. Pemaparan dalam bab ini berupa hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk uraian deskriptif yang bertujuan agar semua keterangan yang diperoleh dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijelaskan secara rinci. Dalam bab ini juga ditemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun pemaparan dalam tahap ini antara lain: Pertama, mengenai latar belakang berdirinya Bank Indonesia yang mencakup proses penasionalisasian De Javasche Bank hingga menjadi Bank Indonesia. Kedua, mengenai perkembangan Bank Indonesia pada tahun 1953-1966. Ketiga, mengenai keterlibatan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 1953-1966 yang mencakup kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1953-1966 dan peranan Bank Indonesia sendiri dalam permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1953-1966.

BAB V Kesimpulan, bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian yang menjadi bahan penelitian. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran dari penulis kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Terutama pada pihak Bank Indonesia yang penulis jadikan sebagai objek penelitian.